

BENTUK PERGERAKAN NASIONAL MYANMAR SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH

Siti Muntamah¹, Andini Fitriani², Reka Seprina³

Pendidikan Sejarah Universitas Jambi¹²³

amahmuntamah57@gmail.com¹, andinif084@gmail.com²,
reka.seprina@unja.ac.id³

Abstrak

Artikel ini menelaah pergerakan nasional Myanmar sebagai studi kasus yang kaya untuk pembelajaran sejarah. Artikel ini menawarkan perspektif berharga tentang dinamika gerakan sosial, strategi perlawanan, dan perjuangan untuk demokrasi. Melalui studi kasus ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman kritis tentang faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya gerakan nasional. Beragam kelompok dan individu yang terlibat, serta ideologi yang memandu perjuangan mereka. Strategi dan taktik yang digunakan oleh gerakan nasional, baik yang bersifat damai maupun konfrontatif. Konsekuensi jangka panjang dari pergerakan nasional dan pengaruhnya terhadap perkembangan Myanmar hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mendorong pembelajaran sejarah yang lebih interaktif dan reflektif, dengan mengaitkan pengalaman masa lalu Myanmar dengan isu-isu kontemporer tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa bentuk gerakan nasional yang dilakukan oleh Myanmar diantaranya yaitu *Student Buddhist Association*/Perkumpulan Mahasiswa Budha (SBA) di Rangoon pada tahun 1904, dan juga *Young Men's Buddhist Association*/Perkumpulan Pemuda Budha (YMBA).

Kata Kunci: Myanmar, Pergerakan Nasional, Pembelajaran Sejarah

PENDAHULUAN

Myanmar (Burma) terletak di wilayah Asia Tenggara dan berhimpitan langsung dengan beberapa negara. Di sebelah barat laut, negara itu berhimpitan dengan India; di sebelah utara, negara itu berhimpitan dengan Tiongkok; di sebelah timur, negara itu berhimpitan

dengan Laos; dan di sebelah barat, Bangladesh berhimpitan dengan India (Awani Irewati, 2020 : 6). Myanmar dulunya memiliki pemerintahan dinasti.

Myanmar adalah negara multietnis dengan beragam identitas dan budaya karena banyaknya suku etnis yang mendiaminya. Mayoritas masyarakat Burma tinggal di negara ini, bersama sejumlah kelompok etnis minoritas lainnya dengan norma sosial dan budaya yang berbeda, termasuk Chin, Kachin, Mon, Bama, Shan, Karen, dan Rohingya. Mayoritas penduduk Myanmar (85%) menganut agama Budha, dan persentase yang lebih kecil juga menganut kepercayaan internal animisme, Kristen, Protestan, Islam, dan Hindu.

Agama Budha memiliki peran penting dalam kehidupan nasional, dan oleh karena itu, empat puluh satu keyakinan agama tersebut mempengaruhi cara orang Myanmar melihat masalah sosial dan politik. Sekitar tahun 1730–1740, bangsa Barat membangun galangan laut atau pangkalan laut di Birma. Mereka menyebut Birma di masa sebelum modern dengan nama Syriam.

Bangsa Barat, terutama Bangsa Inggris, mengunjungi ke wilayah tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk membangun pangkalan laut di sana untuk menguasainya. Selain itu, ia dibarengi dengan persaingan antara Perancis dan Inggris pada saat itu. Perang Myanmar I dan Perang Myanmar II memicu permusuhan masyarakat terhadap Inggris. Permusuhan ini meningkat ketika Inggris mulai menguasai Myanmar, termasuk pelabuhan Rangoon, yang merupakan pelabuhan penting di negara itu.

Inggris menginvasi wilayah Myanmar (Burma) pada tahun 1824. Pada tahun 1826, Arakan dan sebagian besar Myanmar menjadi bagian dari wilayah British-India (Tati Hartimah, 2010 : 88). Burma menjadi jajahan Inggris dari tahun 1826 hingga 1942. Pada tahun 1942, Jepang menjajahnya, namun Inggris tetap menguasainya. Penjajahan Inggris menumbuhkan nasionalisme di kalangan masyarakat Myanmar yang menentang pemerintahan kolonial. Kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Myanmar dimulai pada tahun 1886 ketika pemerintah kolonial

Inggris berpindah dari Kota Mandalay ke Kota Yangon. Kota Youngung digunakan oleh Inggris sebagai bagian dari pemerintahan Inggris di India. Akibatnya, banyak warga negara India yang bermigrasi ke Myanmar.

Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Myanmar berkembang menjadi salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Akibatnya, Myanmar akan menghadapi masalah keruntuhan sosial. Alasannya, sistem perekonomian dikuasai pemerintah kolonial Inggris, bukan Myanmar. Sebuah gerakan nasional juga muncul. Salah satu dari mereka, yang dikenal sebagai Asosiasi Muda Buddha Myanmar, berisiko mengalami berbagai pemberontakan karena meningkatnya nasionalisme. Gerakan nasionalis ini muncul di kota dan desa. Pemberontakan Sayasan tahun 1930-1932 merupakan gerakan nasionalis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moloeng (2014:4) adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi deskriptif tentang individu dan perilakunya yang terlihat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, memanfaatkan metodologi penelitian perpustakaan yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber daya perpustakaan terkait. Tinjauan pustaka dapat juga disebut sebagai penelitian teoritis, dasar pemikiran, tinjauan pustaka, atau tinjauan pustaka.

Teknik literatur adalah strategi penelitian yang digunakan. Pendekatan kepustakaan menurut Bungin (2008) adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk mencari data sejarah. Sastra adalah suatu catatan peristiwa sejarah yang dilestarikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya kolosal lainnya, menurut Sugiyono (2004).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan adalah suatu prosedur yang digunakan dengan cara meninjau tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka penelitian akan

berjalan sebagaimana mestinya dengan menjelaskan Bentuk Pergerakan Nasional Myanmar Sebagai Sumber Belajar Sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase – Fase Pergerakan Nasional Myanmar

Perjuangan rakyat Myanmar menuju kemerdekaan dan demokrasi telah melalui berbagai fase dengan dinamika yang kompleks. Selama bertahun-tahun, Myanmar dilanda kenangan negatif atas pengambilalihan militer di Negeri Seribu Menara. Kudeta ini hanyalah satu dari beberapa kudeta yang terjadi sepanjang sejarah. Tatmadaw dan militer Myanmar sering mengambil kendali sejak kudeta pertama pada tahun 1962. Setelah kudeta 2 Maret 1962, pemerintahan militer dan pemerintahan satu partai diterapkan di Burma (sekarang Myanmar). Selama kudeta, pemerintahan sipil AFPFL Perdana Menteri U Nu digantikan oleh Dewan Revolusi Bersatu, yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Hingga tahun 1987, ketika stabilitas sosial, ekonomi, dan politik terus menjadi tantangan bagi kekuatan sipil dan militer, permasalahan yang dihadapi militer Myanmar berkontribusi pada kekecewaan masyarakat terhadap militer selama satu dekade, (Eric, 1990 : 150). Berikut adalah beberapa fase kudeta yang terjadi di Myanmar.

1. Resistensi terhadap Kolonialisme Inggris (Abad ke-19 - Awal Abad ke-20)

Fase ini ditandai dengan pemberontakan petani dan kelompok etnis yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Inggris. Meskipun sedikit dan tersebar luas, pemberontakan ini menunjukkan penolakan awal terhadap kekuasaan asing. Mereka yang terdidik mulai menyadari pentingnya memiliki negara dan pemerintahan sendiri ketika budaya Barat menyebar. Nilai-nilai Buddha dan semangat untuk kebangkitan budaya Myanmar sangat mempengaruhi gerakan nasionalis awal Myanmar.

2. Perjuangan Kemerdekaan (1920-an - 1940-an)

Fase ini ditandai dengan pembentukan partai politik dan organisasi nasionalis yang lebih terorganisir. Gerakan mahasiswa dan buruh turut berperan aktif dalam menuntut kemerdekaan melalui demonstrasi dan pemogokan. Perang Dunia II menjadi titik balik penting. Pendudukan Jepang dan janji kemerdekaan memicu pembentukan pasukan nasionalis. Namun, konflik internal dan perpecahan politik menghambat proses menuju kemerdekaan.

3. Era Pasca-Kemerdekaan dan Demokrasi Parleментар (1948-1962)

Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1948, Myanmar menghadapi tantangan berat dalam membangun negara baru, termasuk konflik etnis dan pemberontakan komunis. Sistem demokrasi parlementer yang diterapkan terbukti rapuh dan diwarnai oleh ketidakstabilan politik. Meskipun begitu, tokoh nasional seperti Aung San berusaha meletakkan dasar bagi negara yang demokratis dan bersatu.

4. Masa Pemerintahan Junta Militer (1962-2011)

Militer melakukan kudeta pada tahun 1962 dan mendirikan rezim otoriter yang berlangsung hampir lima puluh tahun. Periode ini ditandai dengan represi politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan isolasi internasional. Gerakan pro-demokrasi dan kelompok etnis bersenjata terus melawan junta militer terlepas dari tekanan. Pemberontakan Saffron dan Pemberontakan 8888 adalah peristiwa penting yang menunjukkan keberanian rakyat Myanmar melawan diskriminasi.

Latar Belakang Pergerakan Nasional Myanmar

Menurut Anggarani (2008 : 30), semangat untuk kemerdekaan Myanmar muncul selama masa kolonial Inggris (1886–1942). Pada awalnya, golongan biksu (pongyis) bertanggung jawab atas gerakan nasional. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dan struktur pemerintahan kolonial Inggris, yang mereka yakini telah menegaskan status biksu di Myanmar. Setelah seorang pejuang bernama Aung San meminta bantuan Jepang untuk mengusir Inggris, Jepang berhasil memasuki Burma dan menguasai wilayah tersebut sehingga memperoleh kemerdekaan bagi

negaranya (walaupun janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Burma (Myanmar) tidak terpenuhi).

Setelah itu, pada tahun 1945, Inggris memanfaatkan Burma untuk membantu pengusiran Jepang, yang mengakibatkan Burma kembali berada di bawah kekuasaan Inggris. Tepat pada bulan Januari 1947, Burma dan Inggris menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Burma akan menjamin kemerdekaan pada tahun berikutnya. Maka, pada tanggal 4 Januari 1948, Burma mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris (Awani Irewati, 2020 : 7)

Bramancho dan Soepalho (1977) menjelaskan bahwa: “Di Burma, faktor lain juga memainkan peran penting: pada masa-masa awal gerakan, para biksu Buddha memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan sentimen nasional di dalam gerakan kolonial. Masyarakat Myanmar merasakan kebencian yang sangat besar terhadap tindakan pemerintah kolonial Inggris akibat perampasan kekayaan dan sumber daya mineral mereka oleh penguasa kolonial serta penurunan status nasional Myanmar (Brahmantyo dan Soeparyo, 1977).

Orang-orang mengalami kesulitan menemukan pekerjaan. Setelah kolonial Inggris menguasai ekonomi Myanmar, para pedagang dan pengusaha pribumi mulai disingkirkan. Selain itu, ada persaingan antara Myanmar dan India. Karena sejak 1886 pemerintah kolonial Inggris mengintegrasikan Myanmar sebagai propinsi bagian dari India dan status tersebut berakhir pada tahun 1937 (Anggarani, 2008 : 30). Mereka yang tinggal di Myanmar adalah orang India yang bekerja sebagai tuan tanah, peminjam, atau kaum modal. Dalam kenyataannya, empat atau lima orang India ini merupakan saingan yang kuat bagi orang Myanmar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Darmawan (tanpa tahun) mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada munculnya nasionalisme Myanmar, seperti yang disebutkan di bawah ini :

1. Pada dasarnya, rasa kebangsaan Myanmar, yang baru dijajah pada tahun 1886, belum pernah hilang. Karena Myanmar pada saat itu

menjadi bagian dari India, kolonial Inggris belum pernah memiliki pengaruh yang signifikan di Myanmar.

2. Kemenangan Jepang dalam perang Jepang-Rusia 1905 mendorong nasionalisme India dan Myanmar.
3. Nasionalisme di India mempengaruhi timbulnya nasionalisme di Myanmar.
4. Hak-hak bangsa yang belum merdeka untuk menentukan nasib sendiri diperjuangkan oleh Konstitusi Perdamaian Versailles Wilson.
5. Reformasi Montagu-Chelmsford, yang ditetapkan oleh Inggris untuk India dan tidak berlaku untuk Myanmar, adalah undang-undang yang mengatur pemerintahan India. Undang-undang ini dibuat karena tuntutan keras partai Kongres India terhadap Inggris. Peraturan tersebut mencakup:
 - a. Pemerintahan di India dititik beratkan pada pemerintahan provinsi-provinsi.
 - b. Inggris dan India bertanggung jawab atas pemerintahan provinsi. Inggris menangani urusan penting, sedangkan India menangani urusan kecil. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ada dua pemerintahan yang bekerja sama.
6. Memimpin suatu pemerintahan yang disebut *Dyarchy* (Anggarani, 2008: 32).

Faktanya, sentimen nasionalis di Myanmar baru berkembang setelah Perang Dunia I (1918). Ketika Myanmar mengetahui bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku bagi mereka, mereka menjadi marah. Nasionalisme pertama muncul pada tahun 1919 dan bersifat anti-Inggris. Gerakan ini dipimpin oleh "Dewan Umum Asosiasi Burma" (GCBA).

Dampak Pergerakan Nasional Masyarakat Myanmar

Munculnya gerakan nasional Myanmar memiliki efek yang nyata. Banyak organisasi kebangsaan juga berdiri untuk menentang pemerintah kolonial. Baik saat Inggris menguasai Myanmar maupun saat Jepang datang. Nasionalisme berkembang secara bertahap, mendorong lebih

banyak orang untuk menjadi nasionalis dan memperjuangkan kemerdekaan negara mereka sendiri. Salah satunya didirikan oleh para biksu.

Para biksu membentuk organisasi anti kolonial sebagai cara untuk menentang pemerintah kolonial. Organisasi ini dikenal sebagai *Young Mens Buddhist Association* (YMBA) dan didirikan di Rangoon pada tahun 1906 oleh para pongyis (biksu buddha) di bawah pimpinan U May Oung. Masalah keagamaan dan pelayanan sosial adalah fokus organisasi ini. Selain itu, organisasi ini berusaha untuk mencegah masyarakat menjadi sekuler dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi sangha, atau komunitas Biksu Buddha.

Semangat nasionalisme, pembaharuan sosial, dan peningkatan karya kebudayaan dan kesusasteraan ditanamkan di YMBA. Di Universitas Rangoon dan Sekolah Judson, anggota-anggotanya menyebarkan nasionalisme dan anti-kolonialisme melalui diskusi kelompok politik (Saung, 1991). Pada pertemuan Prome tahun 1920, YMBA berubah nama menjadi GCBA (Dewan Umum Perkumpulan Budha atau *General Councils of Buddhist Association*). Perubahan nama ini menjadi bagian dari gerakan nasionalisme yang semakin meningkat (Saung, 1991).

Pada tanggal 4 Desember 1920, terjadi pemaksaan mahasiswa terbesar dalam sejarah untuk menentang peraturan universitas yang bersifat elitis. Selain itu, GCBA melakukan perlawanan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah kolonial Inggris yang dianggap merugikan Myanmar. Selain itu, banyak organisasi lain muncul yang sebagian besar menentang kolonialisme. Perkumpulan Mahasiswa, gerakan yang terdiri dari mahasiswa, adalah salah satunya. Organisasi ini sangat penting bagi pemerintahan Inggris.

Bentuk Pergerakan Nasional Myanmar

Nasionalisme Myanmar bangkit setelah Perang Dunia I, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India (Inggris). Perang Dunia I mendorong gerakan Myanmar dan menumbuhkan nasionalisme

politik baru. Hal ini menjadi jelas dengan terjadinya pemogokan di universitas. Dan pada tahun 1921, YMBA diubah menjadi GCBA (Dewan Umum Persatuan Birma), sebuah organisasi politik yang sangat nasionalis.



Gambar 1. Bendera Pergerakan YMBA Myanmar

Sumber : Wikipedia

Menyusul perwujudan tujuan politik yang jelas dari gerakan nasional Myanmar, Inggris mengubah kebijakan kolonialnya. Pada tahun 1923, Inggris menerapkan sistem Dyarchy, yang kemudian digunakan di provinsi-provinsi di India. GCBA terpecah menjadi dua faksi di bawah tekanan Inggris: Partai U Chit Hlaing, yang ingin mendorong konsesi lebih lanjut dan mematuhi kebijakan non-kooperatif, dan Partai Dua Puluh Satu, yang menyambut baik perubahan tersebut dan siap untuk bergabung dengan Inggris. Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah itu, para pemimpin nasionalis di Myanmar menjadi terkenal, termasuk Ba Maw dari Partai Shinyata, U Ba Pae dari Partai ke-21, dan U So dari Partai U Chit Hlaing. Tuan U Aung San dan Tuan Takin Nhu dari Partai Takin kemudian muncul. Komisi Simon mengeluarkan proposal untuk India dan Myanmar pada awal tahun 1930-an. Pemotongan harga pertama kali ditawarkan oleh kaum nasionalis, namun karena secara resmi disarankan dan didukung oleh pemerintah Inggris dan komunitas bisnis, hal

tersebut kehilangan kredibilitas. Alasannya adalah kekhawatiran para pemimpin nasionalis mengenai niat pemerintah Inggris untuk terus memaksakan pemerintahan kolonial di Myanmar setelah kepergian mereka dari India.

Akibatnya, kaum nasionalis dengan cepat membentuk Liga Anti-Pemisahan. Kaum nasionalis memenangkan suara karena mereka mampu mempengaruhi masyarakat. Inggris mengeluarkan nota kesepahaman yang memberikan pilihan untuk mempertahankan persatuan dengan India atau menarik diri tergantung pada sikap nasionalisnya. Meskipun kaum nasionalis tidak dapat membujuk Inggris untuk mengizinkan Myanmar menjadi bagian dari Persatuan India dengan hak untuk mengidentifikasi diri, mereka akhirnya setuju untuk keluar (1935). Pada tahun 1935, organisasi Dobama Asiayone (Kami Rakyat Myanmar) didirikan.

Awal Perang Dunia Kedua kemudian datanglah kedatangan tentara Jepang di Myanmar. Pada tanggal 18 November 1939, Parakin, *All Student Organization of Burma* (Organisasi Mahasiswa Seluruh Burma), dan Partai Sinyetha di bawah arahan Dr. Ba Maw mendirikan *Burma Freedom Bloc Organization/Organisasi Burma (BFBO)*, dengan Sekretaris Jenderal Aung San sebagai ketua organisasi. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk membungkam Inggris guna menjamin tanggal dan waktu kemerdekaan Myanmar sebagai konsesi membantu sekutu. Menurut Steinberg (2001:16–17), BFBO adalah organisasi politik yang kohesif dengan tujuan yang jelas untuk mencapai kemerdekaan penuh. Tindakan BFBO bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pertemuan sejumlah inisiatif anti-perang di bawah tanah dan mengklaim bahwa perang tersebut semata-mata tentang kaum imperialis dan tidak ada hubungannya dengan upaya kemerdekaan Myanmar. Pemerintah kemudian membalas dengan menahan diri, mengunci sejumlah pemimpinnya, dan memaksa yang lain untuk masuk secara diam-diam. Tokoh-tokoh dalam organisasi ini berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membangun hubungan dengan beberapa tokoh politik sejarah.

Selain pengaruh modernisasi Jepang yang dikarakterisasi sebagai revolusioner dan patriotis, gerakan ini didorong oleh ideologi sosialis dan komunis. Partai itu juga disebut partai Thakin karena para anggotanya saling menyebut "thakin", yang berarti "tuan." Ini dilakukan dengan tujuan agar orang-orang di Inggris juga menyebut anggota partai itu dengan nama seperti Thakin Nu, Thakin U Aung San, dan sebagainya.

Akibatnya, Inggris secara tidak langsung mengakui status warga negara Myanmar. Setelah Perang Dunia II, Inggris kembali ke Myanmar. Perundingan kemerdekaan Myanmar diprakarsai oleh gerakan politik Myanmar yang dipimpin oleh Aung San. Saat Myanmar bersiap untuk kemerdekaan, beberapa pria bersenjata tiba-tiba memasuki negara tersebut dan membunuh U Aung San. Ternyata geng tersebut atas perintah Wu So sehingga Wu So akhirnya dijatuhi hukuman mati. Aung San digantikan oleh Nunu, dan kemerdekaan Myanmar dideklarasikan pada tanggal 4 Januari 1948.

Selain itu, gerakan mahasiswa berkembang setelah kemerdekaan Myanmar pada bulan Januari 1948. Tahun 1948 hingga awal tahun 1960-an menyaksikan pembentukan pemerintahan demokrasi liberal yang dipimpin oleh U Nu. Ada dua periode waktu selama periode ini: 1948–1958 dan 1960–1962. Jenderal Ne Win memimpin pemerintahan militer setelah tahun 1962. Kedua pemerintahan ini pada dasarnya menganut sistem sosialis. Secara umum, meskipun pemerintah melakukan transisi dari kolonialisme Inggris ke pemerintahan Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis (AFPFL) setelah kemerdekaan pada tahun 1948, hanya ada sedikit perubahan dalam gerakan mahasiswa. Konflik di antara para siswa dengan cepat memperburuk situasi mereka. Kelompok mahasiswa terpecah menjadi dua faksi: mayoritas mendukung AFPFL di badan legislatif negara bagian, sementara minoritas mendukung Partai Komunis, yang dilarang. Hal ini masuk akal mengingat pemimpin mahasiswa terkemuka mendominasi di kedua partai. Siswa terjebak dalam lingkaran setan perpecahan politik. Selain itu, proses demokrasi di dalam organisasi kemahasiswaan dirugikan oleh daya saing yang ada di dalamnya.

Perpecahan Dalam AFPFL, bencana yang akan datang, kekerasan berdarah, dan intervensi asing mengganggu stabilitas negara. Pada tanggal 24 September 1958, U Nu menyerahkan kekuasaan kepada militer di bawah Jenderal Ne Win. Ne Win kemudian membentuk pemerintahan sementara untuk menstabilkan situasi hingga pemilihan umum diselenggarakan (Lintner, 1990: 12-13). Namun, militer mengatakan kepada para mahasiswa bahwa pemerintah yang menghormati demokrasi harus memulihkan situasi dan mengisi kekosongan tersebut dengan sebisa mungkin mendukung penegasan otoritas untuk memerangi ketidakstabilan ekonomi, politik dan hukum (Charney, 2009: 94-95).

Namun, Nu sekali lagi gagal membangun negaranya. Permasalahannya berkisar dari infrastruktur pemerintah yang memecah belah masyarakat berdasarkan keyakinan agama Buddha, minoritas yang menuntut persamaan hak, kemerosotan ekonomi, hingga tuntutan perlindungan hukum bagi pegawai negeri. Maka pada tanggal 2 Maret 1962, militer kembali melakukan kudeta. Jenderal Ne Win kemudian membentuk Dewan Revolusi untuk menyensor media, surat kabar, majalah, film, dan publikasi asing (Seekins, 2002: -82).

Mahasiswa secara terbuka memprotes pemerintahan baru pada bulan Juli 1962 karena mereka yakin hal itu melanggar hukum. Sebagai pembalasan, tentara melancarkan serangan di kampus Universitas Rangoon. Gedung Persatuan Mahasiswa Universitas Rangoon (RUSU), yang menjadi kebanggaan mahasiswa sejak tahun 1930-an, kemudian hancur akibat ledakan. Charney (2009 : 116) mengklaim bahwa kaum nasionalis di Myanmar yang merupakan pendukung kuat Aung San, bapak pendiri negara tersebut, memulai perjuangan mereka dari bangunan ini.

Relevansi Bentuk Pergerakan Nasional Myanmar Sebagai Sumber Belajar Sejarah

Sejarah pergerakan nasional Myanmar bukanlah sekadar catatan peristiwa heroik di masa lampau. Ia adalah cerminan kompleksitas perjuangan suatu bangsa dalam meraih kemerdekaan dan membentuk

identitas nasional. Mempelajari bentuk pergerakan nasional Myanmar menawarkan wawasan berharga tentang dinamika politik, sosial, dan budaya yang membentuk Myanmar hingga kini.

Pertama, kita diajak menyelami konteks sejarah Myanmar yang unik, sebuah bangsa dengan keragaman etnis dan agama yang menghadapi penjajahan Inggris dan dampaknya yang masih terasa hingga kini. Memahami konteks ini krusial untuk menganalisis akar permasalahan yang memicu munculnya pergerakan nasional. Kedua, kita diajak untuk menelaah beragam bentuk perlawanan rakyat Myanmar terhadap penjajahan, mulai dari pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh para raja dan pemimpin agama, hingga gerakan non-kekerasan yang dipelopori oleh kaum intelektual dan nasionalis. Mempelajari spektrum perlawanan ini memberi kita pemahaman tentang strategi perjuangan dan konsekuensinya.

Ketiga, kita diajak untuk menelisik peran penting agama Buddha dalam membangkitkan semangat nasionalisme Myanmar. Para biksu Buddha, seperti Saya San dan U Wisara, menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, serta menginspirasi rakyat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Keempat, kita diajak untuk memahami bagaimana ideologi-ideologi Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, memengaruhi pemikiran para pemimpin pergerakan nasional Myanmar, seperti Aung San dan U Nu. Mereka berupaya mengadaptasi ideologi-ideologi tersebut dengan konteks lokal untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara.

Kelima, kita diajak untuk menyelami dinamika internal pergerakan nasional Myanmar yang kompleks, yang diwarnai oleh perbedaan ideologi, persaingan antar kelompok, dan intrik politik. Mempelajari dinamika ini penting untuk memahami tantangan dalam membangun persatuan dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Keenam, kita diajak untuk menganalisis peran Aung San sebagai tokoh sentral dalam pergerakan nasional Myanmar. Karisma, strategi politik, dan dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan menjadikannya sebagai Bapak Bangsa

Myanmar. Namun, kita juga diajak untuk mengkaji secara kritis sisi lain Aung San, termasuk keputusannya untuk bekerja sama dengan Jepang selama Perang Dunia II.

Mempelajari sejarah pergerakan nasional Myanmar bukanlah sekadar untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika politik di Myanmar, kita dapat berkontribusi dalam mencari solusi damai dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Myanmar. Mempelajari bentuk pergerakan nasional Myanmar bukan hanya tentang menghafal nama, tanggal, dan peristiwa. Lebih dari itu, ia merupakan jendela untuk memahami kompleksitas perjuangan suatu bangsa dalam meraih kemerdekaan dan membentuk identitas nasional.

KESIMPULAN

Gerakan nasionalis Myanmar didukung oleh berbagai factor. Dimulai dengan kemenangan Jepang melawan Rusia pada Perang Laut Jepang tahun 1905. Kemenangan ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan negara-negara Eropa. Dari kemenangan tersebut, Myanmar berpikir bahwa bangsa Asia akan mampu mengalahkan penjajah dan mengusir mereka dari tanah airnya. Selanjutnya, Perjanjian Versailles pada akhir Perang Dunia I mendukung nilai-nilai kebebasan dan penentuan nasib sendiri di setiap negara dan menjadi dasar pelaksanaan gerakan nasional di Myanmar. Awal mula pergerakan nasional di Myanmar Pada tahun 1906, YMBA (*Young Buddhis Association*) atau Liga Pemuda Burma Bersatu didirikan. Gerakan nasional Burma muncul pada masa Perang Dunia I, terutama ketika Burma terpisah dari India. Pergerakan nasional di Myanmar dapat ditelusuri kembali ke masa setelah Perang Dunia I, ketika kesadaran politik dan nasionalisme mulai bangkit di kalangan masyarakat Myanmar. Myanmar, yang pernah menjadi koloni Inggris, merasakan dorongan kuat untuk membentuk identitas nasionalnya sendiri. Faktor internal yang mendorong gerakan ini antara lain kebijakan Inggris yang

mengikat Myanmar berdasarkan Konstitusi India dan persaingan perdagangan dan tenaga kerja antara penduduk lokal dan imigran India di bawah monarki. Faktor eksternal juga turut berperan, seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menginspirasi negara-negara Asia untuk melepaskan diri dari kolonialisme Barat, dan pengaruh nasionalisme India yang memberikan efek domino terhadap Myanmar. Dampak gerakan nasional di Myanmar mencakup peningkatan kesadaran politik dan nasionalisme, yang mengarah pada pembentukan organisasi seperti YMBA (*Young Buddhist Association*). YMBA (Asosiasi Muda Buddha) kemudian menjadi GCBA (Dewan Umum Asosiasi Burma) dan menjadi politis. Bentuk pergerakan nasional di Myanmar meliputi pembentukan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang agama, masalah sosial, dan pendidikan, yang kemudian mengalihkan fokusnya ke bidang politik. Perubahan ini ditandai dengan pemogokan di universitas dan perubahan nama dari YMBA menjadi GCBA. Gerakan ini juga mencakup upaya politik seperti pembentukan aliansi anti-pemisahan diri dan perjuangan untuk mempengaruhi penduduk guna mendukung kemerdekaan Myanmar.

SARAN

Gunakan artikel ini sebagai titik awal untuk meneliti lebih lanjut tentang sejarah Myanmar. Cari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap. Bagikan pemikiran dan refleksi Anda tentang artikel ini dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Teruslah mencari informasi tentang Myanmar, terutama tentang perkembangan politik dan sosial terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggarani, M. (2008). *Perjuangan anti Kolonialisme Birma*. Jakarta: UI
Aye Saung. (1991). *Catatan-catatan Dari Bawah Tanah*. Jakarta: LP3ES.

- Brahmantlyo dan Soeparyo. (1977). *Sejarah Asia Tenggara Jilid II*. Malang: IKIP Malang.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Charney, Michael W. (2009). *A History of Modern Burma*. Cambridge: Cambridge
- Eric A. Nordlinger. (1990). *Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hartimah, Tati . (2010). *Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar*. Jurnal : Al-Turas. Vol. 16 No. 1.
- J.Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lintner, Bertil. (1990). *Outrage: Burma's Struggle for Democracy*. London: White Lotus. University Press.
- Maiwan, M. (2014). *Gerakan Mahasiswa Dalam Kemelut Politik Di Myanmar: Pergulatan Mewujudkan Kebebasan*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Vol 13 No 2. Hal. 39-60.
- Steinberg, David I. (2001). *Burma: The State of Myanmar*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.